

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2022, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terealisasi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang sejahtera dan lebih baik.

Wonogiri, 2021
INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika dan Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
	3.1. Tujuan	16
	3.2. Sasaran	16
	3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV	PENUTUP	18
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai topiknya.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2016 – 2021. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Wonogiri dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mernengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
19. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Maksud

Agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- Sebagai pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022.
- Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD dan keterkaitan Dokumen Perencanaan yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur tentang kewenangan Organisasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan susunan garis besar isi dan pokok bahasan Renja OPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra OPD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian Tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan.

Menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra OPD.

3.2. Sasaran.

Menjelaskan tentang rumusan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Periode 2016 – 2021.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk :

- a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2020. Pada Tahun 2020 total anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 8.622.841.390,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 998.771.490,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.624.069.900,00 yang ditujukan untuk mendukung 6 (enam) program dan 40 (empat puluh satu) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi sebesar Rp. 6.691.555.162,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 877.688.634,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.813.866.528,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 77,60%.

Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2016 – 2021, dikarenakan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 2.1. (terlampir).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 5 program utama dengan capaian sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Indikator kinerja program ini adalah persentase terlaksananya program pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan target 100%. Indikator ini dipasang untuk mengukur kelancaran tugas pengawasan dalam satu tahun. Di tahun 2020, program ini terealisasi 117, 04% yang disebabkan terdapatnya beberapa tugas tambahan/mandatori yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH di tahun 2020 sebesar Rp. 459.217.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 365.577.456,00 (79,61%). Penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan saat pelaksanaan kegiatan tidak bisa melibatkan semua personel yang ditunjuk karena adanya tugas-tugas insidental ataupun kegiatan yang bersamaan waktunya, khususnya kegiatan pengawasan terkait penanganan Covid-19.

Untuk mendukung program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, diimplementasikan melalui 16 kegiatan, yakni :

a.1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan ini difokuskan untuk mengawal pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Wonogiri melalui asistensi maupun monitoring. Output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan monitoring/asistensi, realisasi atas kegiatan ini 100%.

Untuk menyukseskan kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 10.340.000,00 yang hanya terserap Rp. 5.651.085,00 (54,65%). Hal ini disebabkan personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat sedikit.

Selain itu terdapat rencana kegiatan yang tidak bisa terlaksana, seperti kegiatan konsultasi dengan instansi vertikal yang terkait karena instansi vertikal yang terkait tersebut sudah turun ke lapangan.

a.2. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan ini memfasilitasi koordinasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan instansi vertikal seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Selain terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, juga terkait koordinasi/konsultasi seperti dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), maupun kegiatan pengawasan lainnya. Untuk keberhasilan kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 1.711.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.711.500,00 (100%).

a.3. Reviu LKD Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri bisa dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya. Kegiatan ini terkait erat dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan saat ini LKD Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut. Untuk mendukung kegiatan ini, anggarannya sebesar Rp. 4.222.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.221.500,00 (99,99%).

a.4. Pengawasan internal secara berkala pada Pemerintah/Desa Kelurahan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa/kelurahan. Output kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan atas desa/kelurahan. Dari target 23 desa, terealisasi 23 desa (100%). Anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 terserap Rp. 50.597.812,00 (90,35%).

a.5. Pengawasan atas Implementasi SAKIP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman OPD atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan pemahaman yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan skor hasil evaluasi yang baik, laporan atas kinerja OPD bisa diyakini akuntabilitasnya. Dengan akuntabilitas yang tinggi diharapkan sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Pada tahun 2020, kegiatan evaluasi LKJ IP OPD ditargetkan dilaksanakan terhadap 54 OPD, termasuk kegiatan

Reviu atas LKj IP Pemda Kabupaten Wonogiri, terealisasi 54 OPD (100%). Anggaran sebesar 59.026.000,00 terserap 37.831.675,00 (64,09%).

a.6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dengan melakukan monitoring dan pemantauan tindak lanjut. Dari 25 LHA yang ditargetkan dapat terealisasi 120% (30 LHA). Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.000.000,00 terserap Rp. 1.989.000,00 (99,45%).

a.7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg)

Kegiatan ini bertujuan melakukan pengawasan di bidang pengawasan. Dari target 19 Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW), dapat terealisasi 19 LHW (100%). Anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 dapat terserap Rp. 37.571.600,00 (98,87%).

a.8. Pelaksanaan Pengawasan Khusus/Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan/audit dengan tujuan tertentu ataupun pengawasan mandatori yang belum tertuang dalam PKPT. Pada tahun 2020 direncanakan 22 laporan, dapat terealisasi 39 laporan (177,27%). Capaian output yang tinggi disebabkan adanya tugas mandatori berupa Reviu DAK. Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 terserap Rp. 64.768.367,00 (99,64%).

a.9. Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan kegiatan asistensi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang mempengaruhi capaian Opini WTP dari BPK RI. Realisasi atas kegiatan ini di tahun 2020 dapat tercapai 250% dari target 2 laporan terealisasi 5 laporan, meskipun terhadap anggaran sebesar Rp. 22.690.000,00 hanya terserap Rp. 11.247.500,00 (49,57%).

a.10. Reviu Dokumen Rencana Pembangunan & Anggaran Tahunan Daerah

Dalam kegiatan ini melaksanakan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD, RKA maupun

DPA sehingga dapat dilakukan pengendalian atas dokumen dimaksud agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra OPD. Dari target 31 Laporan, terealisasi 18 Laporan (58,06%). Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 terserap Rp. Rp. 13.092.500,00 (43,64%).

a.11. Kegiatan Supervisi, Pencegahan dan Penindakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Wonogiri

Kegiatan ini bertujuan melakukan kegiatan – kegiatan pencegahan agar tidak terjadi pungutan liar, khususnya di area pelayanan. Di Tahun 2020 dapat terealisasi 1 Laporan seperti yang telah ditargetkan (100%). Dengan dana sebesar Rp. 36.000.000,00 dapat terserap Rp. 31.278.000,00 (86,88%).

a.12. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 kegiatan ini dimaksudkan dalam hal penanganan kasus/aduan masyarakat. Tidak hanya melalui pemeriksaan langsung ke lapangan namun juga melalui analisis/penelaahan atas aduan yang masuk, karena tidak semua kasus yang masuk bermuatan pengawasan. Dari target 7 kasus/aduan, di Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan penelaahan/pemeriksaan atas 14 kasus/aduan (200%). Sedangkan serapan anggarannya sebesar Rp. 67.576.117,00 (84,47%).

a.13. Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan atas 3 hal yakni pembangunan Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Kapabilitas APIP. Semua kegiatan tersebut dapat terealisasi di Tahun 2020 (100%). Dari sisi anggaran, dari dana sebesar Rp. 9.500.000,00 terserap Rp. 1.655.000,00 (17,42%).

a.14. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam kegiatan ini direncanakan untuk pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan yang berguna dalam membantu pengolahan data – data hasil pengawasan. Meski outputnya dapat tercapai 100% (2 Laporan) namun kegiatan ini berjalan tanpa adanya anggaran karena terkena dampak refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 di tahun 2020.

Namun demikian, kegiatan ini masih bisa berjalan. Hal ini disebabkan updating program SIMWAS HP oleh pihak ketiga dan Inspektorat Provinsi tidak terdapat kejelasan perkembangannya. Untuk pengolahan data dilaksanakan secara manual sehingga belum dibutuhkan banyak anggaran untuk penyusunan SIMWAS.

a.15. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Pengawasan rutin terhadap SKPD, Sekolah, dan BUMD. Dari target 7 LHP dapat terlaksana 9 LHP (128,57%). Dari anggaran sebesar Rp. 24.727.500,00 terserap Rp. 22.013.500,00 (89,02%).

a.16. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)

Dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses verifikasi LHK ASN dengan realisasi anggaran terserap Rp 14.372.300,00 (71,86%) kegiatan ini dapat terlaksana sesuai target (100%).

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Indikator kinerja program ini adalah penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor. Capaian realisasi program ini di tahun 2020 adalah sebesar 100%. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. di tahun 2020 sebesar Rp. 6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.491.000,00 (91,52%). Untuk mendukung Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan., diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yakni Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor, dengan output jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya. Target di tahun 2020 sebanyak 25 auditor dengan realisasi 25 auditor (100%).

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Indikator kinerja program ini adalah kelancaran operasional kantor yaitu dengan target 12 bulan yang terealisasi 12 bulan (100%).

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini sebesar Rp. 407.820.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 383.755.646,00 (94,01%).

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Indikator kinerja program ini adalah kenyamanan operasional kantor dengan target 12 bulan yang teralisasi sebesar 12 bulan (100%)

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini sebesar Rp. 110.275.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.405.042,00 (97,40%).

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Indikator kinerja program ini adalah SDM APIP yang berkualitas dengan target 3 orang, terealisasi 6 orang (200%).

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini sebesar Rp. 13.951.490,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.951.490,00 (100%).

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
- c. Adanya sumber daya aparatur yang senantiasa responsif, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan pencapaian target masing – masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonogiri. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, reviu dan asistensi.

Analisis kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2 (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

- a. Dinamika regulasi dari atas sangat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang seringkali berdampak pada bertambahnya tugas – tugas yang belum bisa ditampung saat penyusunan PKPT. Kondisi ini mengharuskan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai daya adaptasi yang tinggi, hal ini tentunya harus didukung dengan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM APIP;
- b. Kapasitas dan kecukupan SDM APIP yang berkompeten menjadi permasalahan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Hal ini disebabkan regenerasi yang belum bisa mengimbangi berkurangnya jumlah APIP akibat memasuki masa pension;
- c. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi dilingkungan kerja;
- d. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- e. Pemahaman para Perangkat Daerah yang kurang tentang pentingnya pengawasan, system pengendalian intern dan reformasi birokrasi menyebabkan capaian akan hal tersebut masih kurang.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Disamping itu juga, dokumen Renja Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.3. (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4. (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yaitu “Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis” Berdasarkan pada visi Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan Visi Inspektorat sebagai berikut :

“PENGAWAS INTERNAL YANG PROFESIONAL UNTUK Mendukung Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Wonogiri yang Baik.”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi, yaitu: Menyelenggarakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan peran Inspektorat sebagai *conselling partner* dan *quality assurance* organisasi perangkat daerah.

3.1. Tujuan

Berdasar Misi yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ditetapkan adalah : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya.

Indikator Kinerja :

- a. Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah

3.2. Sasaran

Dengan mendasarkan misi dan tujuan , maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas SPIP, dengan Indikator Kinerja : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini, bisa dilaksanakan dengan baik, lancar dan selamat. Aamiin.

Wonogiri, 2021
INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E.
Tingkat Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002

- b. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten, dengan Indikator Kinerja :
 - 1. Opini BPK;
 - 2. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, dengan Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP
- d. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan Indikator Kinerja : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 adalah sebagaimana table 3.1. (terlampir).

LAMPIRAN

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan SKP s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Penunjang Pengawasan								
A	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Auditor dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan							
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Auditor dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan	180 Orang	109	3	6	200,00	152	84,44
2	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	Jumlah Auditor yang dinilai Angka Kreditnya	150 Orang	89	25	25	100,00	139	92,67
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase APIP yang lulus diklat	100%						
1	Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/ Sosialisasi	Jumlah Auditor dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/ Pelatihan/ Sosialisasi	68 Orang	59	-	-	-	59	86,76
C	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terlaksananya program pengawasan sesuai PKPT	100%						
1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan hasil asistensi/evaluasi SPIP OPD	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	6	100,00
2	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Sinkronisasi dan pemutakhiran data hasil pengawasan/ sinkronisasi dokumen perencanaan pengawasan tahunan (PKPT)	58 Kali	38 Kali	10 Kali	10 Kali	100,00	58	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan SKP s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri	Laporan keuangan daerah yang direviu	6 Laporan	4 Laporan	1 laporan	1 Laporan	100,00	6	100,00
4	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada pemerintah Desa dan kelurahan	Jumlah Desa/kelurahan yang diawasi	251 Desa	198 Desa	23 Desa	23 Desa	100,00	257	102,80
5	Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan	Jumlah LHA yang Terpantau rekomendasinya	450 LHA	290 LHA	25 LHA	30 LHA	120,00	358	79,56
6	Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg)	Laporan Hasil Wasdalpeg/LHW	85 LHW	55 LHW	19 LHW	19 LHW	100,00	89	104,71
7	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)	Jumlah laporan verifikasi LHKASN	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	6	100,00
8	Pelaksanaan Pengawasan Khusus/lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu/ Khusus lainnya	82 LHP	85 LHP	22 LHP	39 LHP	177,27	139	169,51
9	Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan PD dan PPKD	20 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	250,00	22	110,00
10	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang direviu	155 Laporan	125 Laporan	31 Laporan	18 Laporan	58,06	191	123,23
11	Supervisi Pencegahan dan Penindakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Wonogiri	Laporan Pelaksanaan Saber Pungli	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	5	100,00
12	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Kasus aduan masyarakat yang ditangani	50%	237,50%	100%	100,00%	100,00	100	200,00
13	Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Laporan pelaksanaan kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi (ZI, MCP, SPI)	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	16	100,00

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Wonogiri

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3		1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	N/A	3	
2	Opini BPK	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	WTP	
3	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten			CC	CC	CC	B	B	B	CC	B	BB	BB	N/A	BB	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional			90	90	90	90	90	90	90	90,8	91,16	93,77	95,65	95	
5	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	N/A	3	

Tabel 2.3.
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING	
	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Inspektorat	Peningkatan pelayanan & ketepatan laporan		12.659.000.000,00		9.265.321.551,00	
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	6.000.000,00	4 Dokumen	4.999.801,00	
	1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	RKA, DPA, Renja yang disusun	3 Dokumen	3.000.000,00	3 Dokumen	3.000.000,00	
	1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	LKj IP yang disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	1.999.801,00	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun		10.015.000.000,00		8.491.802.571,00	
	2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	14 Kali	10.000.000.000,00	14 Kali	8.482.802.571,00	
	2.2.	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	CALK	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	
	2.3.	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Laporan Fungsional, Laporan Semesteran	14 Laporan	10.000.000,00	14 Laporan	6.000.000,00	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	5 Laporan	35.000.000,00	5 Laporan	3.000.000,00	
	3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	RKBMD yang disusun	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	
	3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Buku Persediaan & Berita Acara	1 Laporan	5.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	
	3.3.	Koordinasi & Penilaian BMD SKPD	Inspektorat	Laporan koordinasi dan penilaian BMD	1 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	
	3.4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	
	3.5.	Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Laporan aset yang disusun	1 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	
	3.6.	Penatausahaan BMD pada SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan yang disusun	1 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	
	3.7.	Pemanfaatan BMD SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan yang	1 Laporan	5.000.000,00	-	0,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING	
	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun		193.000.000,00		87.519.179,00	
	4.1.	Peningkatan Sarana & Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat	Presensi Hadirku	1 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	1.000.000,00	
	4.2.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Inspektorat	Pakaian dinas	1 Kali	50.000.000,00	1 Kali	1.000.000,00	
	4.3.	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	SK KP & SK KGB	1 Laporan	5.000.000,00	24 SK	1.000.000,00	
	4.4.	Koordinasi & Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Inspektorat	Bezetting & mekanisme kepegawaian	1 Laporan	5.000.000,00	16 Laporan	1.000.000,00	
	4.5.	Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	Rekap SKP	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	
	4,6	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Inspektorat	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti bimtek/ kursus/ singkat/ pelatihan/ sosialisasi dan jabatan fungsional tertentu yang dinilai angka kreditnya	65 Orang	105.000.000,00	50 Orang	81.519.179,00	
	4.7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	ASN yang mengikuti bimtek	1 Laporan	20.000.000,00	10 Orang	1.000.000,00	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat			303.000.000,00		173.000.000,00	
	5,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Alat listrik yang tersedia	12 kali	5.000.000	15 jenis	5.000.000	
	5,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	ATK, Bahan komputer	12 kali	80.000.000	30 jenis	60.000.000	
	5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Tabung pemadam kebakaran dan isi tabung	12 kali	2.000.000	9 tabung	2.000.000	
	5,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	makan dan minum	12 kali	70.000.000	12 kali	45.000.000	
	5,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	bahan cetak yang tersedia	12 jenis	50.000.000	12 jenis	15.000.000	
	5,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	jurnal/surat kabar/majalah	12 kali	4.000.000	12 kali	4.000.000	
	5,7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	makan dan minum tamu	1 laporan	20.000.000	12 kali	10.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING	
	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 kali	60.000.000	15 kali	30.000.000	
	5,9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	7.000.000	1 laporan	1.000.000	
	5,10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Inspektorat	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	5.000.000	1 laporan	1.000.000	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat			1.650.000.000,00		122.000.000,00	
	6,1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Kendaraan dinas	1 unit	300.000.000	1 unit	0	
	6,2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	kendaraan dinas atau lapangan	3 unit	900.000.000	1 unit	54.000.000	
	6,3	Pengadaan Alat Besar	Inspektorat	genset	1 unit	50.000.000	1 unit	1.000.000	
	6,4	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Mebel	1 buah	50.000.000	5 unit	20.000.000	
	6,5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	peralatan dan mesin lainnya	6 unit	100.000.000	6 unit	30.000.000	
	6,6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	buku peraturan	1 buah	50.000.000	5 unit	2.000.000	
	6,7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Inspektorat	Aset tak Berwujud	1 buah	50.000.000	-	0	
	6,8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	gedung kantor atau bangunan lainnya	1 buah	50.000.000	1 unit	5.000.000	
	6,9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	1 unit	50.000.000	1 unit	5.000.000	
	6,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	50.000.000	1 unit	5.000.000	
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat			302.000.000		263.000.000	
	7,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	materai	200 Buah	2.000.000	200 Buah	2.000.000	
	7,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	47.000.000	12 kali	40.000.000	
	7,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	3.000.000	2 kali	1.000.000	

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat khususnya pada tugas-tugas di Bidang Pengawasan/ Pemeriksaan

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NO	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Peningkatan pelayanan & ketepatan laporan	Inspektorat		9.265.321.551		9.392.563.590
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang disusun	Inspektorat	4 Dokumen	4.999.801	4 Dokumen	4.999.801
		1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA, Renja yang disusun	Inspektorat	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000
		1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKj IP yang disusun	Inspektorat	1 Dokumen	1.999.801	1 Dokumen	1.999.801
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat		8.491.802.571		8.619.044.610
		2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Inspektorat	14 Kali	8.482.802.571	14 Kali	8.610.044.610
		2.2. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	CALK	Inspektorat	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000
		2.3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Fungsional, Laporan Semesteran	Inspektorat	14 Laporan	6.000.000	14 Laporan	6.000.000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Inspektorat		3.000.000	1 Laporan	3.000.000
		3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RKBMD yang disusun	Inspektorat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000
		3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Buku Persediaan & Berita Acara	Inspektorat	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000
		3.3. Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan aset yang disusun	Inspektorat	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Inspektorat		87.519.179		87.519.179
		4.1. Peningkatan Sarana & Prasarana Disiplin Pegawai	Presensi Hadirku	Inspektorat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000
		4.2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian dinas	Inspektorat	1 Kali	1.000.000	1 Kali	1.000.000
		4.3. Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SK KP & SK KGB	Inspektorat	24 SK	1.000.000	24 SK	1.000.000
		4.4. Koordinasi & Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bezetting & mekanisme kepegawaian	Inspektorat	16 Laporan	1.000.000	16 Laporan	1.000.000
		4.5. Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	Rekap SKP	Inspektorat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000
		4.6. Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti bimtek/ kursus/ singkat/ pelatihan/ sosialisasi dan jabatan fungsional tertentu yang dinilai angka kreditnya	Inspektorat	65 Orang	81.519.179	65 Orang	81.519.179

NO	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
	4.7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti bimtek	Inspektorat	15 Orang	1.000.000	15 Orang	1.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Inspektorat		173.000.000		173.000.000
	5,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik yang tersedia	Inspektorat	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000
	5,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Bahan komputer	Inspektorat	4 kali	60.000.000	4 kali	60.000.000
	5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tabung pemadam kebakaran dan isi tabung gas	Inspektorat	9 tabung	2.000.000	9 tabung	2.000.000
	5,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan dan minum	Inspektorat	12 kali	45.000.000	12 kali	45.000.000
	5,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetak yang tersedia	Inspektorat	4 kali	15.000.000	4 kali	15.000.000
	5,6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jurnal/surat kabar/majalah	Inspektorat	12 kali	4.000.000	12 kali	4.000.000
	5,7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan dan minum tamu	Inspektorat	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000
	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat	30 kali	30.000.000	30 kali	30.000.000
	5,9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Inspektorat	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000
	5,10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Inspektorat	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Inspektorat		122.000.000		122.000.000
	6,1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas	Inspektorat	1 unit	0	1 unit	54.000.000
	6,2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas atau lapangan	Inspektorat	3 unit	54.000.000	3 unit	0
	6,3	Pengadaan Alat Besar	genset	Inspektorat	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000
	6,4	Pengadaan Mebel	Mebel	Inspektorat	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000
	6,5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat	6 unit	30.000.000	6 unit	30.000.000
	6,6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	buku peraturan	Inspektorat	25 unit	2.000.000	25 unit	2.000.000
	6,7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
	6,8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Inspektorat	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
	6,9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Inspektorat		263.000.000		263.000.000
	7,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	Inspektorat	200 Buah	2.000.000	200 Buah	2.000.000
	7,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 kali	40.000.000	12 kali	40.000.000

NO	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIFITAS		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
	7,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	4 kali	1.000.000	4 kali	1.000.000
	7,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perabot kantor, alat kebersihan dan jasa kebersihan, keamanan dan sopir	Inspektorat	12 kali	220.000.000	12 kali	220.000.000
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat		120.000.000		120.000.000
	8,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya jasa, biaya, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Inspektorat	2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000
	8,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat	17 Buah	80.000.000	17 Buah	80.000.000
	8,3	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Inspektorat	2 Kali	5.000.000	2 Kali	5.000.000
	8,4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000
	8,5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Inspektorat	1 Buah	5.000.000	1 Buah	5.000.000
	8,6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	1 Gedung	5.000.000	1 Gedung	5.000.000
	8,7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	1 Gedung	5.000.000	1 Gedung	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat	231 Laporan	519.528.295	231 Laporan	519.528.295
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Inspektorat	132 Laporan	287.399.295	132 Laporan	287.399.295
	1.1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	4 Laporan	37.000.000	4 Laporan	37.000.000
	1.2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	5 Laporan	50.636.000	5 Laporan	50.636.000
	1.3.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	54 Laporan	56.000.000	54 Laporan	56.000.000
	1,4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	1 Laporan	15.764.000	1 Laporan	15.764.000
	1,5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	Inspektorat	30 Laporan	84.999.676	30 Laporan	84.999.676
	1,6	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022**

Inti Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.00 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	1				INSPEKTORAT DAERAH					10.098.815.022				10.226.057.061			
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.265.321.551				9.392.563.590			
6	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.999.801				4.999.801			
6	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	3.000.000
6	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100%	1.999.801	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.999.801
6	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.491.802.571				8.619.044.610			
6	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan dan tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 kali	100%	8.482.802.571	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	8.610.044.610
6	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	3.000.000

6	1	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 orang	100%	81.519.179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	81.519.179
6	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 orang	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									173.000.000			173.000.000	
6	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan alat listrik selama satu tahun	Persentase fasilitasi administrasi umum PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 jenis	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	5.000.000
6	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	Persentase fasilitasi administrasi umum PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 jenis	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	60.000.000
6	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah tabung pemadam kebakaran dan isi tabung gas	Persentase fasilitasi administrasi umum PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 tabung	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	2.000.000
6	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan bahan logistik untuk kegiatan yang terfasilitasi	Persentase fasilitasi administrasi umum PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 kali	100%	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	45.000.000
6	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	Persentase fasilitasi administrasi umum PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 jenis	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	15.000.000

6	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 laporan	100%	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	6.000.000
6	1	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									3.000.000		3.000.000		
6	1	1	2,03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Persentase administrasi barang daerah pada PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	Persentase administrasi barang daerah pada PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan BMD	Persentase administrasi barang daerah pada PD	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									87.519.179		87.519.179		
6	1	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Laporan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan pakaihan dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 kali	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	24 SK	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000
6	1	1	2,05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	16 laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 persen	1.000.000